

BAB III

DUKUNGAN TIONGKOK TERHADAP REZIM MADURO DALAM KRISIS POLITIK DI VENEZUELA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana awal mula terjadinya krisis politik, yang akan menjelaskan pada era Maduro yang kemudian berujung dengan adanya kemunculan pihak oposisi yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya, lalu memaparkan respon negara lain terhadap krisis yang sedang terjadi di Venezuela dan terakhir penulis akan menjelaskan bentuk dukungan yang diberikan oleh Tiongkok kepada rezim Maduro.

A. **Kronologi Peristiwa Krisis Politik di Venezuela**

1. **Krisis Ekonomi menjadi Awal Krisis Politik**

Sebelum membahas krisis politik di Venezuela lebih jauh, eksistensi krisis ekonomi terlebih dahulu muncul dan menjadi awal permulaan krisis berbagai krisis di Venezuela yaitu krisis politik. Bermula dari penemuan ladang minyak terbesar di Venezuela ditemukan di daerah pegunungan ditahun 1922. Tiga tahun berikutnya wilayah tersebut menjadi jantung ekonomi Venezuela dan menjadikan negara tersebut negara pengeksport minyak terbesar didunia. Sepanjang Perang Dunia II, Venezuela mampu menghasilkan produksi minyak menyentuh 1 milliar barrel per hari (Wiarda & Kline, 2013).

Ketika di tahun 1950 wilayah Timur Tengah menemukan minyak dan mengekspor banyak minyak dengan baik, harga minyak dipasaran menjadi turun lantaran tingginya produksi sedangkan permintaan sedikit. Tahun berikutnya Venezuela, Arab Saudi, Kuwait, Iraq, dan Iran mengadakan pertemuan bersama dan memprakarsai berdirinya OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*) yang memiliki untuk menyelamatkan harga minyak kembali ke

harga yang seharusnya dengan meregulasi produksi.

Tak berselang setahun didirikannya OPEC, harga minyak mulai turun kembali. Hal ini disebabkan oleh Perang Arab-Israel yang mengakibatkan pemblokadean ekspor yang dilakukan oleh Arab Saudi kepada negara-negara yang mendukung Israel termasuk Amerika Serikat. Ketika harga minyak naik di tahun berikutnya sebanyak 34 US\$ per barrel, negara-negara minyak seperti Venezuela berdampak. Akan tetapi hal ini tidak berselang lama. Venezuela sebagai negara yang menjadikan minyak sebagai komoditas utama perdagangan dan tumpuan ekonomi juga berdampak pada ekonomi Venezuela ketika harga minyak anjlok (Ikenberry, 2009).

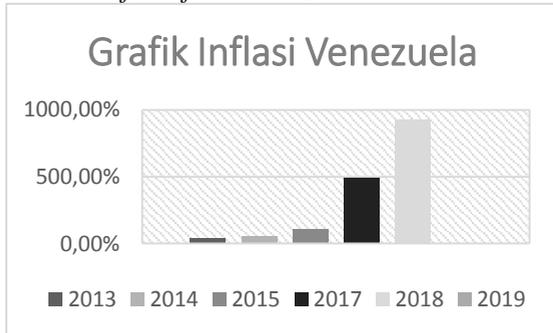
Pada tahun 1999, Hugo Chavez menduduki kursi presiden di Venezuela. Tiongkok menjadi kreditur Venezuela untuk membantu memproduksi minyaknya dan untuk membantu melancarkan tujuan ekonomi Chavez. Kerjasama antara keduanya mayoritas ada di bidang energi dan sumber daya alam. Satu tahun berikutnya, harga minyak mulai kembali normal. Venezuela merupakan negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Menurut data OPEC tahun 2015, Venezuela punya cadangan minyak mentah dalam perut bumi sejumlah 300 miliar barrel, dibandingkan dengan Arab Saudi yang hanya 226 miliar dan Iran 158 barrel serta Irak 142 miliar barrel (Agiesta, 2019).

Krisis finansial global membuat harga minyak jatuh pada saat pengaruh Venezuela di OPEC memudar. Industri minyak Venezuela tidak pernah sepenuhnya pulih dari pemogokan minyak selama bertahun-tahun, negara tersebut telah memproduksi di bawah kuota produksi resminya. Venezuela berkali-kali menyerukan pengurangan produksi

dalam skala besar kepada anggota OPEC, akan tetapi tidak yang mau menerima hal tersebut (Millard, Hoffman, Gertz, & Lin, 2019).

Ketika krisis minyak sedang parah-parahnya di tahun 2018, Maduro mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan atau mengedarkan uang Bolivar (mata uang Venezuela) sebanyak-banyaknya. Hal tersebut justru memperparah krisis karena mengalami defaluasi. Tak berseleang lama, Maduro mengeluarkan mata uang Bolivar baru yaitu dengan memangkas lima nol dalam uang Bolivar sebelumnya. Selain itu negara Amerika Selatan tersebut menaikkan upah minimum dan pajak bahan bakar sebesar 3.400% yang membuat kenaikan tersebut tidak mengurangi krisis (Wirayani, 2018).

Tabel 3.1 Grafik Inflasi Venezuela



Melimpahnya minyak di Venezuela, membuat negara tersebut memijakkan perekonomiannya berdasarkan jual minyak atau investasi minyak. Jadi, ketika harga minyak sedang tinggi maka pemasukan ke Venezuela juga tinggi, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi kekayaan itu yang kemudian menjadi awal dari kehancuran Venezuela.

2. Krisis Politik di Era Rezim Hugo Chavez

Chavez terpilih menjadi presiden Venezuela di tahun 1999 dan dimulailah era pemerintah yang menganut paham sosialis. Menurut Chavez, pemerintahan Venezuela antara tahun 1958 hingga 1998 telah terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Mengakui bahwa pasar bebas dapat membantu perekonomian di Venezuela justru berakibat sebaliknya (Grid.ID, 2019). Struktur politik Venezuela dilanda oleh kapitalisme kroni dan nepotisme. Aset sosial yang dihasilkan oleh kekayaan minyak sebagian besar masuk ke kantong segelintir elit, meninggalkan populasi perkotaan besar untuk hidup dalam barrios tanpa infrastruktur dasar, air, listrik atau perawatan kesehatan (Gott, 2011).

Sejak Hugo Chavez berkuasa di tahun 1999, Chavez langsung menerapkan kebijakan untuk menyetarakan ekonomi rakyat. Kebijakan ini merupakan bentuk dari implementasi “*Bolivarian Revolution/* Revolusi Bolivarian” dan “*Twenty First Century Socialism/* Sosialisme abad 21” (Wiarda & Kline, 2013). Langkah Chavez untuk mensejahterakan rakyatnya dengan memberikan subsidi pangan, perumahan, transportasi hingga subsidi kesehatan. Keuntungan negara dari penjualan minyak dialokasikan untuk mensejahterakan rakyat, untuk program sosial gratis bagi rakyat, dan untuk mengurangi kemiskinan (Agiesta, 2019). Sejak itu, program sosial Presiden Hugo Chávez, yang ia juluki “Misi Sosial,” menjadi panji utama pemerintah untuk tampil di hadapan dunia sebagai revolusi politik sejati dengan konten sosial tinggi yang berupaya mengubah kondisi kehidupan orang miskin (Navarro, 2008).

Kesejahteraan yang diusung oleh Chavez ini tidak berlangsung lama. Hal ini dikarenakan

ketergantungan Venezuela terhadap hasil minyak dengan kapitalisme transnasional masih tinggi. Amerika Serikat merupakan partner dagang utama Venezuela terutama dibidang sumber daya alam minyak. Selain itu Misi Sosial yang digemborkan era Chavez melalui privatisai perusahaan swasta menjadi milik nasional juga menjadi masalah. Pasalnya para pebisnis sektor swasta yang dulu berada di pihak Chavez kemudian beralih mendukung kalangan oposisi untuk menyabotase agenda Sosialisme abad 21 Chavez (Kusman, 2017).

Kemudian di tahun 2002 telah terjadi kudeta yang dilakukan oleh oposisi sayap kanan Venezuela, yang didukung oleh pemerintah Amerika Serikat. Dukungan dari Amerika Serikat dikarenakan Oposisi meluncurkan kudeta di mana Presiden Chavez yang terpilih secara demokratis dicopot dari jabatannya, diculik, dan digantikan oleh Pedro Carmona, kepala konfederasi bisnis Fedecamaras di Venezuela. Komplotan kudeta kemudian membatalkan konstitusi, dan membubarkan semua badan publik. Kudeta dibatalkan ketika protes massa oleh rakyat Venezuela dan sektor-sektor tentara yang setia pada konstitusi mengembalikan Chavez ke kekuasaan pada 14 April (English, 2015). Hingga kematian Hugo Chavez pada tahun 2013, ia tetaplah dijuluki seorang pahlawan revolusi bagi kaum kelas menengah kebawah. Kursi presiden Venezuela dilanjutkan oleh Nicholas Maduro, wakilnya, untuk meneruskan sementara kepemimpinan Chavez hingga pemilihan secara demokratis.

3. Krisis Politik di Era Rezim Nicholas Maduro

Nicholas Maduro menduduki kursi presiden setelah terpilih secara demokratis dengan perolehan suara 50,6 %, dibandingkan pesaingnya

Henrique Capriles Radonski memperoleh 49,1% pada tanggal 14 April 2013 (BBC.com, Maduro menang pemilu presiden Venezuela, 2013). Pada hari setelah pemilihan Capriles menyebutkan beberapa penyimpangan dalam pemungutan suara. Namun dua hari setelah pemilihan, Maduro diresmikan dalam upacara yang diboikot oleh oposisi. Kekerasan meletus ketika para pendukung Maduro dan Capriles bentrok di jalan-jalan.

Pihak oposisi yang melakukan boikot ini merupakan pihak yang sama dengan kudeta 2002 dan juga mendapatkan dukungan Amerika Serikat. Kudeta ini dilatarbelakangi oleh kecemasan Amerika Serikat akan kembalinya pengaruh sosialis di kawasan Amerika Selatan. Terlebih lagi, pemikiran tentang misi sosial Chavez menganut komunis Kuba, Fidel Castro (Wiarda & Kline, 2013).

Pada awal tahun 2014, harga minyak kembali turun dan Venezuela menghadapi krisis ekonomi yang besar. Negara yang kaya akan minyak ini mengalami inflasi tertinggi didunia dan memiliki banyak hutang. Persediaan makan dan air bersih semakin menipis dan hampir menyebar keseluruh negeri. Besar inflasi Venezuela kala itu mencapai hingga 50%. Hal ini juga berdampak pada naiknya harga-harga barang karena harga minyak turun, produk pertanian mengalami penurunan, kacang kedelai dan meluasnya peternakan sapi sedangkan permintaan sedikit karena harga-harga menjadi naik (Falleti, 2019).

Demonstrasi banyak terjadi di beberapa daerah, akibat krisis ekonomi dan tindak kejahatan semakin meningkat. Menurut berita yang dilansir oleh koran Caracas, La Patilla, sebanyak 4.833 protes terjadi sepanjang tahun 2014. Aksi protes ini dibedakan menjadi dua kubu, yaitu demonstran yang tidak setuju akan hasil politik dan mereka yang

menyuarakan hak-haknya, seperti hak untuk berpartisipasi dalam berpolitik. Ketika itu para pendukung oposisi tidak diperbolehkan untuk menyumbangkan suara yang menyebabkan ketidakadilan dalam pemungutan suara (Destacados, 2015).

Kemudian kubu yang satunya diwaarnai oleh mereka yang ingin menyuarakan hak kemanusiaannya. Semenjak krisis ekonomi tahun 2014 lalu di Venezuela, menyebabkan terjadinya kelaparan dan kenaikan harga pangan. Kebebasan untuk berpendapat juga terbatas. Beberapa media dibungkam, dilarang meliput sisi negatif pemerintahan seperti kerusuhan, jika meliput akan dikenai sanksi (Wiarda & Kline, 2013).

Semenjak pihak oposisi memenangkan kursi majelis nasional dengan memenangkan mayoritas dua pertiga utama dalam pemilihan legislatif, majelis nasional mengeluarkan rancangan referendum untuk menurunkan Maduro. Pihak pro-pemerintah atau kubu Maduro menolak dengan tegas hal ini. Berdasarkan pidato Maduro dua hari setelah referendum itu dikeluarkan bahwa Venezuela akan mengalami krisis yang lebih parah jika imperialis dijalankan. Tahun berikutnya referendum berhasil dibatalkan (CNNIndonesia, 2018).

Pemerintah Venezuela pada Januari 2016 telah mengumumkan keadaan darurat ekonomi. Angka menunjukkan bahwa ekonomi Venezuela telah mengalami guncangan sebesar 4,5% dalam sembilan bulan pertama 2015. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia tetapi penurunan besar dalam harga minyak dalam 18 bulan terakhir telah memangkas pendapatannya sebesar 60%. Inflasi tahunan hingga september 2014 dikatakan oleh Bank Sentral Venezuela telah mencapai 111,8%. Ditambah lagi, tabungan negara

sudah terkuras habis, karena program sosial pemerintah era Chavez hingga saat itu masih berjalan. Hal ini dibenarkan oleh Maduro, akan tetapi menurutnya program ini harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena rakyat membutuhkannya (BBC.com, Venezuela economy: Nicolas Maduro declares emergency, 2016).

Kemenangan Nicholas Maduro pada bulan Mei 2018 kemarin, banyak ditentang oleh rakyat Venezuela terutama dari kalangan oposisi. Adanya beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan pemilu dan ketidak-adilan dalam pemilihan suara mengakibatkan bentrok masa. Pelaksanaan pemilu awalnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Desember, kemudian dimajukan lagi pada tanggal 22 April lalu diundur menjadi bulan Mei. Ketidakjelasan pemerintah dalam mengumumkan tanggal pemilu, juga diduga oleh oposisi bahwa pemerintah Maduro ingin mengulur waktu (BBC.com, 2018).

The National Electoral Council(NCE) Venezuela menyebutkan bahwa jumlah suara yang masuk hanya sebesar 46,1%, jauh dari 80% yang terdaftar pada pemilihan presiden terakhir pada 2013. Suara terbanyak Maduro berasal kaum miskin dengan perolehan suara sebanyak 67,7%, karena mereka berterima-kasih atas program pelayanan yang telah diberikan pemerintahan Chavez kemudian dilanjutkan oleh Maduro (Phillips, 2018).

Ketika upacara pelantikan Nicholas Maduro, pihak oposisi mencoba mengagalkan upacara tersebut dan tidak mengakui kemenangan Maduro. Kemudian munculah tokoh baru dari pihak oposisi yaitu Juan Guaido. Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada rapat umum di Caracas hanya beberapa minggu setelah Maduro

memulai masa jabatan keduanya. Guaido sebelumnya merupakan presiden Majelis Nasional Venezuela yang baru dilantik, dua hari sebelum pelantikan Maduro sebagai presiden (Morello, 2019).

Dilansir dari VOANews, Majelis Nasional menganggap bahwa adanya ketidakadilan selama pelaksanaan pemilu pada Mei 2018. Sebagai presiden Majelis Nasional, Guaido mengatakan bahwa dalam kasus-kasus seperti itu dapat dikatakan kursi presiden sedang kosong, konstitusi dapat memberikan hak kepada kepala Majelis Nasional untuk mengambil alih sebagai penjabat presiden (VOA News, 2019).

Tak berselang lama, Amerika Serikat mengakui Juan Guaido sebagai Presiden Venezuela. Kudeta mulai dijalankan oleh Guaido dan pendukungnya pada bulan Mei 2019 (Al-Jazeera, 2019). Sekutu Amerika Serikat seperti Spanyol, Inggris, Prancis, Swedia, Jerman, Denmark, Austria, Belanda, Latvia, Israel, Jepang, dan Republik Ceko serta negara-negara Amerika Latin mulai mengakui Guaido sebagai presiden sementara sampai pemilu ulang diadakan di Venezuela. Sedangkan Maduro mempertahankan dukungan militer dan sekutu-sekutu penting Venezuela, termasuk Rusia dan Tiongkok (Tiezzi, 2019).

Gambar 2.1 Negara yang mendukung Maduro dan Guaido

Waning Support

Global leaders back Venezuela's Guaidó as Maduro clings to usual allies



Source: Bloomberg research

Bloomberg

Sumber: Bloomberg (Martinez, 2019)

Guaidó menyuruh para pendukungnya untuk turun ke jalanan untuk mendemo Maduro. Sebelum melakukan aksi turun ke jalanan, pemberontakan militer sudah dilakukan oleh pihak oposisi namun gagal, karena hampir semua militer menengah keatas loyal kepada Maduro. Di pusat ibukota Venezuela, pemberontakan diwarnai aksi lempar bom molotov dan batu oleh demonstran, sedangkan polisi menembaki dengan gas air mata dan peluru karet. Di tempat lain demonstrasi dilakukan oleh para pendukung pro-pemerintah. Dalam bentrokan tersebut telah menewaskan dua orang dengan luka tembak dan 69 orang luka-luka (BBC, 2019).

Krisis politik yang terjadi Venezuela juga menyebabkan krisis kemanusiaan. Efek yang paling signifikan ialah terjadinya gelombang pengungsi. Berdasarkan angka, PBB menunjukkan bahwa sekitar 2,7 juta orang telah meninggalkan Venezuela sejak 2015 dan hampir sekitar 5.000 warga Venezuela bermigrasi mencari suaka dan penghidupan yang lebih layak (Budiartie, 2019). Pada tahun 2016, Majelis Nasional Venezuela mendeklarasikan krisis kemanusiaan kepada

pemerintah Maduro agar para rakyat mendapatkan obat-obatan yang penting dan mendapatkan kebutuhan medis yang lainnya.

Karena ketiadaan pangan dan bantuan yang dikarenakan oleh penolakan Maduro atas pemberian bantuan dari sayap kanan menambah gelombang emigrasi semakin tinggi. Diperkirakan sebanyak 3 juta warga Venezuela keluar dari negaranya yang mana ini mencapai 10% populasi Venezuela. Negara tetangga Venezuela yang akan mendapatkan penerimaan pengungsi lebih tinggi, misalnya Brazil, Kolombia dan Argentina. Hal yang paling mengejutkan dari gelombang pengungsi Venezuela ini ialah mereka melakukan perjalanan menggunakan jalan kaki agar sampai ke perbatasan karena mahalnya biaya transportasi. Hingga sekarang masalah yang paling serius dari krisis politik Venezuela ialah arus pengungsi (Falleti, 2019). Berikut adalah peta persebaran pengungsi Venezuela.

Gambar 3.2 Rute Migrasi Venezuela



Sumber: UNHCR dari berita BBC (BBC, 2019)

B. Berbagai Respon Negatif terhadap Krisis Politik di Venezuela

Krisis politik Venezuela memunculkan berbagai respon dari berbagai kalangan. Komunitas internasional masih terbagi atas kelompok pendukung Maduro dan anti-Maduro. Kelompok Lima negara-negara Belahan Barat dan Uni Eropa mendukung pemerintah Guaido tetapi menentang intervensi militer untuk menggulingkan Maduro. Kelompok Kontak Internasional, yang didukung oleh Uni Eropa dan beberapa negara Amerika Latin, telah mendukung negosiasi yang dipimpin oleh Norwegia yang mengarah ke penyelenggaraan pemilihan yang diamati secara internasional.

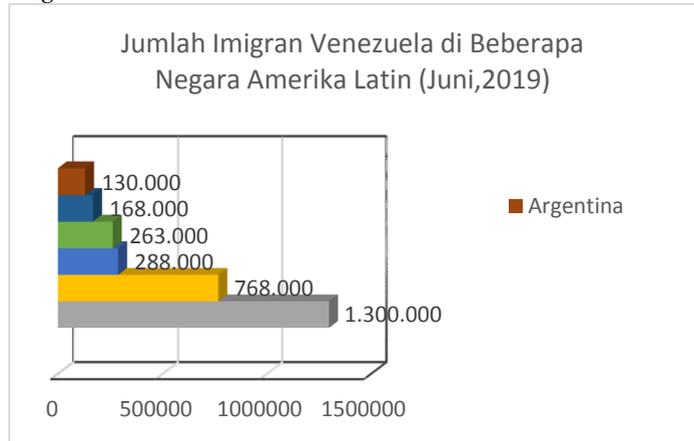
Kolombia dan Chile telah menolak hasil pemilu curang tahun 2018 itu. Kedua negara tersebut tidak mengakui Maduro sebagai presiden Venezuela. Lebih dari 40 negara sedang mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan diplomatik atau mengurangi hubungan mereka dengan Venezuela mulai 10 Januari, ketika dia dijadwalkan untuk memulai masa jabatan enam tahun baru di kantor (Oppenheimer, 2018).

Meningkatnya gelombang pengungsi ke beberapa negara tetangga Venezuela menimbulkan masalah bagi negara penerima. Negara penerima harus menyediakan lebih banyak persediaan makanan, medis dan akomodasi sementara. Selain itu, beberapa migran membawa surat berisi formulir yang memiliki tujuan berbeda. Beberapa dokumen tersebut memiliki tujuan berbeda-beda misal mereka ingin mendapatkan pekerjaan dengan mengganti status pengungsi atau suka menjadi pekerja. Ini membutuhkan lebih banyak investasi dalam fasilitas administrasi dan pemrosesan .

Brazil dan Kolombia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Venezuela. Serangkaian protes dan kekerasan telah terjadi di negara bagian Roraima di perbatasan Brazil, khususnya kota Pacaraima. Kekerasan ini dipicu oleh meningkatnya

emigran Venezuela di Pacaraima yang membuat kesusahan daerah tersebut dalam mengelola berbagai masalah. Ketidaksbilan ini membuat para pemrotes lokal di Pacaraima menyerang kamp-kamp migran dan membakar sejumlah barang-barang mereka (Sekarwati, 2018).

Tabel 2 Jumlah Imigran Venezuela di Beberapa Negara Amerika Latin



Brasil tidak sendirian dalam mengalami tekanan pengungsi. Pada bulan Agustus, Ekuador dan Peru memperketat persyaratan masuk bagi para migran Venezuela dalam upaya untuk membendung arus kedatangan. Venezuela sekarang hanya bisa memasuki kedua negara dengan paspor mereka, daripada dengan kertas ID yang banyak digunakan sebelumnya. Sulit bagi banyak rakyat Venezuela untuk mendapatkan paspor, karena tingkat birokrasi yang tinggi serta kekurangan kertas dan tinta di negara asal mereka, dan langkah ini akan berdampak pada imigrasi legal ke kedua negara (The Economist Intelligence Unit Limited, 2018).

Menanggapi tin rezim Maduro yang semakin tidak demokratis, administrasi Trump memberlakukan sanksi yang membatasi akses Venezuela ke pasar keuangan AS pada Agustus 2017 dengan meningkatkan

tekanan fiskal pada pemerintah tersebut. Pada November 2017, pemerintah Venezuela mengumumkan akan berupaya merestrukturisasi utangnya. Pemerintah dan perusahaan minyak negara, *Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA)*, kemudian melewatkan pembayaran obligasi utama, menyebabkan lembaga pemeringkat kredit mengeluarkan pemberitahuan default. Restrukturisasi hutang diperkirakan akan menjadi proses yang panjang dan kompleks, dan tidak jelas apakah Venezuela akan melakukan pembayaran utang yang akan datang (Nelson, 2018).

Pihak Gedung Putih mengumumkan bahwa status sanksi ekonomi dinaikkan menjadi embargo ekonomi. Tindakan ini meliputi membekukan harta benda dan aset pemerintah Venezuela dan siapapun yang membantu pejabat Venezuela akan mendapatkan sanksi. Embargo ekonomi diberikan Trump kepada Venezuela karena adanya perebutan kekuasaan yang berkelanjutan dari oleh Maduro dengan Guaido serta adanya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penangkapan sewenang-wenang dan tidak sah terhadap warga negara Venezuela, dibatasinya kebebasan dalam berekspresi, termasuk untuk anggota media, dan upaya untuk melemahkan Presiden Sementara Juan Guaido (Crowley & Kurmanaev, 2019).

Krisis politik dan melemahnya harga minyak di Venezuela telah berkontribusi terhadap penyusutan perdagangan dengan Amerika Serikat. Apalagi Amerika Serikat merupakan partner dagang utama Venezuela. Penyusutan dalam perdagangan ini memberikan dampak besar terhadap perekonomian Venezuela. Menanggapi ketidakstabilan politik dan ekonomi, beberapa perusahaan besar Amerika Serikat telah meninggalkan Venezuela atau membatasi operasi di negara tersebut.

Investor Amerika Serikat yang memegang obligasi di Venezuela dan PdVSA akan menghadapi

kerugian besar jika masih berhubungan dengan Venezuela karena negara tersebut dapat menunda pembayaran atau mencari restrukturisasi hutang yang agresif. Pemegang obligasi berada pada tahap awal pengorganisasian akan memasuki negosiasi restrukturisasi dan /atau mengejar tantangan hukum melawan pemerintah Venezuela. Obligasi berdenominasi dolar Venezuela dikeluarkan berdasarkan hukum New York, dan tuntutan hukum pemegang obligasi yang mencari pembayaran akan dilakukan di pengadilan Amerika Serikat. Tantangan hukum dapat mengakibatkan perebutan aset Venezuela di Amerika Serikat, seperti CITGO (yang perusahaan induknya adalah PdVSA), ekspor minyak, dan pembayaran tunai untuk ekspor minyak (Nelson, 2018).

Meskipun Venezuela menyumbang kurang dari 1% dari total investasi langsung AS di luar negeri, banyak perusahaan Amerika Serikat telah mendirikan anak perusahaan atau fasilitas manufaktur di Venezuela.⁴⁶ Menurut Departemen Luar Negeri, lebih dari 500 perusahaan AS diwakili di Venezuela pada pertengahan tahun 2016. Namun, sebagai tanggapan terhadap ketidakstabilan politik dan ekonomi, beberapa perusahaan besar Amerika Serikat telah meninggalkan Venezuela, membatasi operasi di sana, atau merestrukturisasi anak perusahaan untuk meminimalkan paparan perusahaan induk (Gillespie, *Corporate America's Nightmare Run in Venezuela*, 2017). Contohnya termasuk Bridgestone (produk ban dan karet), Colgate (produk rumah tangga dan perawatan pribadi), Delta (maskapai penerbangan), GM (mobil), Kimberly Clark (produk berbasis kertas), Mondelez (camilan), Pepsi (minuman ringan), dan United Airlines (Gillespie, *Corporate America's Nightmare in Venezuela is Getting Worse*, 2018).

Perusahaan Coca-Cola juga telah menghentikan produksi Coke karena tidak ada gula. Maskapai penerbangan internasional termasuk

Aeromexico bulan lalu telah menghentikan penerbangan ke dan dari Caracas karena kontrol mata uang membuat hampir tidak mungkin untuk mengirimkan laba ke negara asal (Campoy, 2016).

C. Bentuk-Bentuk Dukungan Tiongkok kepada Venezuela

Kebanyakan respon dari krisis politik di Venezuela merupakan respon negatif. Bahkan ketika negara-negara lain mundur dari melakukan bisnis dengan Caracas, Beijing tetap mempertahankan dukungan keuangannya. Tiongkok adalah pemberi pinjaman bilateral terbesar Venezuela, tetapi telah melepaskan ikatan keuangannya dengan Venezuela sejak Presiden Maduro menggantikan Hugo Chavez pada 2013. Kemudian Tiongkok mendukung kembali Maduro dalam pemilihan presiden 2018 lalu.

Pada 28 Januari 2019 lalu, Tiongkok melalui Menteri Luar Negeri, Geng Shuang, mengatakan bahwa Tiongkok mendukung pemerintah Venezuela untuk untuk menegakkan kedaulatan nasional, kemerdekaan, dan stabilitas. Pemerintahan Trump telah memukul perusahaan minyak negara Venezuela dengan sanksi yang menyakitkan yang diperkirakan akan memperdalam krisis ekonomi yang ada di negara itu. Dukungan ini juga ditandai dengan kedatangan Presiden Xi Jinping ketika pelantikan Maduro.

Tiongkok menentang dorongan AS untuk menggulingkan Maduro dan sanksi sepihak. Dan Beijing tentu saja memiliki preferensi untuk menjaga kuantitas yang diketahui tetap berkuasa untuk menjaga pinjaman dan investasinya di Venezuela. Tapi jangan salah mengira bahwa kebijakan pragmatis untuk pelukan sepenuh hati dari Maduro. Di atas segalanya, Tiongkok menghargai stabilitas, dan Maduro telah gagal secara spektakuler untuk menyediakannya. (Tiezzi, 2019).

Tiongkok mendukung rezim Maduro dengan memberikan pinjaman untuk minyak Venezuela. Selama dekade terakhir dari tahun 2007 hingga 2016, Tiongkok telah memompa 62 miliar dollar AS ke Venezuela, yang merupakan 53 persen dari semua uang Tiongkok yang dipinjamkan ke Amerika Latin (Huang, 2019). Dalam ranah untuk menegakkan kedaulatan di Venezuela, Tiongkok memberi pinjaman 50 million dollar AS dan sisanya masuk kedalam sektor minyak (McCarthy, 2017).

Timbal balik yang diberikan oleh Venezuela atas bantuan pinjaman-minyak (*oil-loan*), perusahaan nasional Tiongkok CNPC mendapatkan bagian untuk mengeksplorasi salah satu kilang minyak terbesar di Venezuela yang terjadi sejak tahun 2004. Dan kemudian di tahun 2009, Tiongkok dapat mengekstrak minyak di wilayah sabuk Orinocco yang menjadi ladang minyak terbesar di kawasan Amerika Latin (Ríos, 2013).

Ketika krisis politik terjadi tahun 2018, Maduro melakukan kunjungan diplomatik ke Beijing, dimana dirinya mengadakan perundingan dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang. Hasil dari pertemuan tersebut ialah pendatanganan 28 kesepakatan yang meratifikasi kesepakatan pembangunan bersama, penanaman modal, ratusan juta investasi untuk merealisasikan pembangunan perusahaan minyak PdVsA (BBC, 2018).

Akibat dari krisis berkepanjangan di Venezuela, mulai dari ekonomi, politik hingga kemanusiaan membuat Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi kepada pemerintah Maduro tersebut. Penerapan sanksi yang diberikan Amerika Serikat telah berdampak buruk bagi perekonomian Venezuela. Beberapa perusahaan multinasional dipaksa meninggalkan Venezuela atau jika tidak akan mendapatkan sanksi dari Pemerintah Washington (CNN, 2019).

Terjadinya pemadaman listrik di Venezuela yang berlangsung selama lima hari ini diduga oleh Maduro merupakan tindakan Amerika Serikat. Hal ini dibenarkan setelah pemasok listrik nasional Corpoelec melaporkan adanya sabotase di pembangkit listrik tenaga air utama Guri. Tiongkok akan menyiapkan bantuan dan bantuan teknis untuk memperbaiki jaringan listrik Venezuela. Bantuan ini tidak dijelaskan secara detail oleh pemerintah Tiongkok, akan tetapi menurut sumber listrik di beberapa wilayah kecuali barat Venezuela mulai nyala kembali (Reuters, 2019).

Bulan Mei lalu, Tiongkok mengirimkan bantuan berupa pengiriman bantuan 71 ton medis. Bantuan ini merupakan hasil dari pertemuan Maduro dengan Xi Jinping tahun 2018 lalu dalam bidang kerja sama kemanusiaan. Sebelumnya pada bulan Maret lalu Tiongkok sudah mengirimkan bantuan obat-obatan sebanyak 65 ton. Kebutuhan medis yang diberikan Tiongkok berupa kebutuhan wanita hamil dan obat-obatan (CNNIndonesia, 2019).

Selama krisis politik yang terjadi di Venezuela, Tiongkok tidak pernah turun tangan secara langsung untuk membantu Venezuela keluar dari krisis tersebut. Misalkan seperti Amerika Serikat melakukan intervensi urusan dalam merebut kekuasaan Maduro melalui dukungannya kepada Guaido. Dan ketika kerusuhan terjadi pada bulan Mei 2019 lalu Pompeo, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa Amerika Serikat siap melakukan intervensi militer (VOA Indonesia, 2019). Perlakuan Amerika Serikat di Venezuela bertolak belakang dengan Tiongkok. Politik Luar Negeri berdasarkan empat asas, salah satunya ialah prinsip non-intervensi. Hal ini dibenarkan oleh Presiden Xi Jinping dalam kunjungan resmi pemimpin Tiongkok ke Rusia bahwa Tiongkok menentang adanya intervensi militer dan meminta semua pihak untuk mendukung solusi damai untuk masalah-masalah di negara itu melalui dialog politik inklusif dan dalam

konflik Venezuela. Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan hal yang sama. Jika keduanya terlibat dalam pengiriman senjata ke Venezuela hal tersebut tak lebih dari sekedar perdagangan dengan pemerintah Venezuela (Efe-Epa, 2019).